



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, dipandang perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2016, sebagian besar indikator kinerja belum berupa *outcome*, sehingga pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan belum menggambarkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan;

- c. bahwa telah terjadi perubahan strukur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatikayang berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi pada beberapa satuan kerja;bahwa telah terjadi perubahan strukur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi pada beberapa satuan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2014);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1868

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



Bertiana Sari

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KOMINFO NO.
22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2015—2019

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Kondisi Umum

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan *Government Public Relations* (GPR).

**Capaian Program Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2010—2015**

Selama periode tahun 2010—2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan internet yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Kebijakan dan Regulasi



Kebijakan dan regulasi merupakan capaian strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai payung hukum pelaksanaan pos, komunikasi dan informatika. Dalam kurun waktu tahun 2010—2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan kebijakan dan regulasi sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
3. Kebijakan penataan pita frekuensi 2.1 GHz;
4. Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5. Kebijakan penetapan besaran dan penggunaan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPFSR atau BHP Pita);
6. Kebijakan tentang acuan teknis standar perangkat pos dan informatika serta pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika untuk semua perangkat yang beredar di wilayah Republik Indonesia.
7. Kebijakan Redesain USO
8. Kebijakan TKDN 4G LTE
9. Kebijakan Kartu Prabayar
10. Nomor Panggilan Tunggal Darurat (Single Emergency Number)
11. Migrasi TV Analog ke Digital
12. Tata Kelola Domain Instansi Penyelenggara Negara
13. Roadmap e-government
14. Roadmap cyber security
15. Tata kelola e-commerce
16. Mekanisme Partisipasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja Kementerian Kominfo

Penyederhanaan Proses Perizinan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Pelayanan Perizinan Yang Lebih Baik ada 8 Peraturan Menteri Kominfo diubah dalam rangka reformasi perizinan yaitu:

1. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dari **60 hari** menjadi **14 hari kerja**.
2. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dari **60 hari** menjadi **14 hari kerja**.

3. Izin Stasiun Radio (ISR) berbayar:
 - Untuk yang baru dari 44 hari kerja menjadi 21 hari kerja
 - Untuk yang perpanjangan dari **7 hari kerja** menjadi **3 hari kerja**.
4. Izin Stasiun Radio yang tidak berbayar dari **14 hari kerja** menjadi **7 hari Kerja**
5. Izin Amatir Radio dari **14 hari kerja** menjadi **10 hari kerja**.
6. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dari **28 hari kerja** menjadi **10 hari kerja**.
7. Sertifikasi Alat dan perangkat telekomunikasi:
 - Melalui pengujian dari **30 hari kerja** menjadi **23 hari kerja**
 - Melalui evaluasi dokumen dari **10 hari kerja** menjadi **7 hari kerja**.
8. Izin Penyelenggaraan Pos, dari **14 hari kerja** menjadi **10 hari kerja**.

Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas



Dalam kurun waktu tahun 2010—2015 capaian terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah:

Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / *Universal Service Obligation (USO)*

Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*) khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan daerah yang secara ekonomi belum berkembang;

Public Service Obligation (PSO) bidang pos untuk 2322 KPC LPU

Merupakan penyediaan jasa pos sesuai yang dilakukan untuk kantor pos cabang layanan pos universal (KPC LPU). KPC LPU yang melaksanakan PSO bidang pos selama periode 2010—2014 rata-rata per tahun sebanyak 2.322 KPC LPU;

Pembangunan Tugu berkode pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan

Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pemberian kode pos melalui

pembangunan tugu berkode pos. Sampai dengan tahun 2015 sudah dibangun tugu berkode pos di 37 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Indonesia

NIX di 19 ibukota provinsi dan IIX di 3 ibukota provinsi

Program ini merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses lokal maupun internasional. Tujuan Nusantara Internet Exchange (NIX) dan International Internet Exchange (IIX) adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanannya karena berkurangnya *latency*, meningkatkan kecepatan dan *quality of service (QOS)* dan berdampak pada pengurangan biaya operasional ISP/NAP. NIX dan IIX juga merupakan sarana filter konten, pengamanan jaringan, serta menjadi pendorong pertumbuhan konten melalui penyediaan sarana dan infrastruktur *web cache* dan *colocation* untuk penyelenggara telekomunikasi serta penyelenggara sistem transaksi elektronik. Sampai dengan tahun 2014, NIX telah dibangun di 33 ibukota provinsi (19 yang beroperasi), sedangkan IIX telah dibangun di 4 ibukota provinsi (3 yang beroperasi);

Palapa Ring di 514 Kab/ Kota

Jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang merupakan infrastruktur akses tetap pitalebar telah dibangun oleh PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) di 400 kabupaten/kota; sedangkan 114 Kabupaten/kota lainnya akan dibangun oleh Kemkominfo bersama dengan PT Telkom sampai dengan tahun 2019.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Capaian terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu tahun 2010—2015 adalah:

Government Service Bus di 37 instansi Pemerintah

Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan *Government Service Bus* (GSB-MANTRA) untuk 37 instansi pemerintah;

Pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP DIY

Sebagai upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun *pilot project e-learning* untuk 300 SD dan 200 SMP di provinsi DI Yogyakarta;

Perlindungan masyarakat melalui PP No. 82 Tahun 2012

Perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana yang menjadi domain kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas dari sisi teknologi informasi yang diatur pada pasal 3 PP 82/2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik;

Indeks PeGI Nasional telah mencapai 2,8

Kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah telah dipetakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI) dengan tujuan agar dapat menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pemetaan kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah secara nasional digambarkan dalam bentuk indeks PeGI Nasional, dimana pada tahun 2014 indeks PeGI Nasional menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di instansi pemerintah sudah baik dengan nilai indeks 2,8;

Aplikasi e-Business untuk 300 UKM

Untuk meningkatkan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memfasilitasi bantuan penyediaan infrastruktur maupun pembangunan *softskill*, dengan meningkatkan penggunaan aplikasi *e-business* untuk UKM melalui pemanfaatan web log dan blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Sampai dengan tahun 2014, jumlah UKM yang telah menerapkan aplikasi e-business sebanyak 300 UKM di seluruh Indonesia;

Trust+Positif telah memblokir 811.050 situs berkonten negatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan sistem Trust+Positif untuk menyaring konten internet yang dapat digunakan masyarakat menuju internet sehat dan aman, yang dalam tahap ini menjadi acuan bagi pelayanan *internet service provider* (ISP). Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemblokiran terhadap 811.050 situs dengan konten negatif;

Pemberdayaan 6.000 Relawan TIK

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberdayakan relawan TIK sebanyak 6.000 orang yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan transformasi pemahaman TIK yang sehat untuk menuntaskan kesenjangan digital;

Pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah

Pemeringkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan indeks keamanan informasi. Pemeringkatan itu merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah;

Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC

Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC (*Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure/Coordination Center*) untuk pencegahan, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan jaringan telekomunikasi serta penanganan insiden pada infrastruktur kritis. Pada tahun 2014 total data serangan yang tercatat oleh sistem pemantauan mencapai 48,4 juta serangan, dengan insiden website yang tercatat sebanyak 12.088 insiden dan target terbanyak adalah domain.go.id sejumlah 3.288 insiden.

Konten Internet Bermuatan Positif (*Whitelist*) dengan daftar domain.id sebanyak 153.006 domain

Penerapan sistem *Whitelist* merupakan salah satu dari sistem *Blacklist* dimana merupakan bentuk murni pengaturan konten-

konten di internet yang digunakan untuk memonitor konten jaringan internet dalam mengakses internet. Penerapan sistem ini juga dibarengi dengan pendaftaran nama domain.id sebanyak 153.006 domain

Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik



Advokasi pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mendorong pembentukan

Pembangunan Media Center

PPID di 34 kementerian, 129 lembaga negara, 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota;

Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *Government Public Relation/Humas* Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pusat media (*media center*) di 171 lokasi.

200 KIM telah terbentuk di seluruh Indonesia

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi ke daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pascakonflik, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pasca konflik dengan jumlah 200 KIM di seluruh Indonesia.

48 Tenaga Humas Pemerintah

Tenaga Humas Pemerintah mempunyai tugas menyampaikan dan berkomunikasi kepada publik terutama dalam hal penyerapan aspirasi publik terkait program-program yang dijalankan oleh Pemerintah.

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika



Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi dan informatika sejumlah 21 SKKNI, dengan 8.216 orang yang sudah tersertifikasi, program beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri sejumlah 2.566 orang penerima beasiswa, serta pelaksanaan program pendidikan penyiaran dan multimedia dilaksanakan di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sedangkan terkait penelitian, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan 484 karya riset dan penelitian yang telah diterbitkan dalam berbagai terbitan ilmiah.

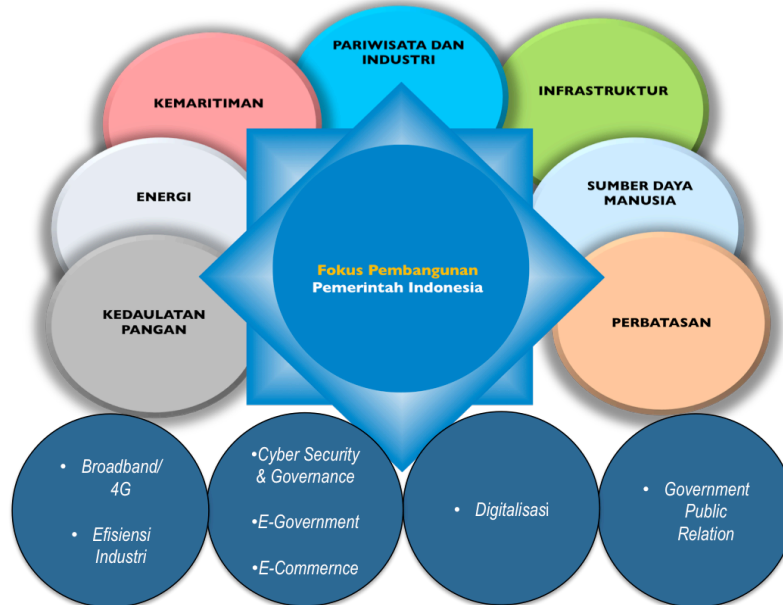


1.2 Potensi dan Permasalahan

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara

A



B

C1

Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019

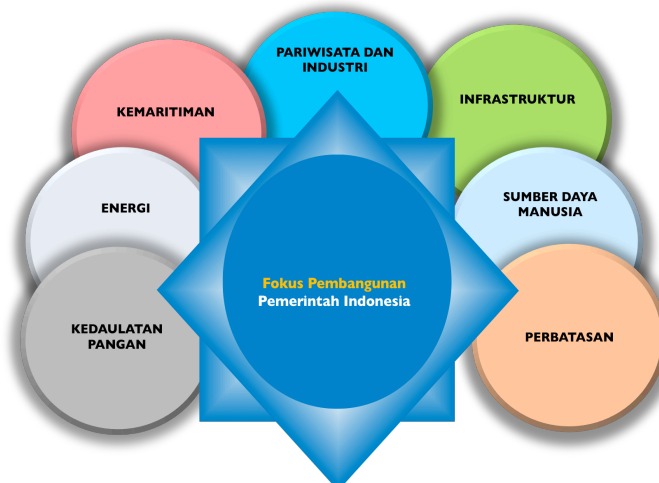
C2

Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan Permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) tema besar, yaitu:

A. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia

A



Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015—2019, antara lain sebagai berikut:



1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia

Pemahaman tentang *digital divide* atau kesenjangan digital selalu dikaitkan dengan perbedaan antara akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang disebabkan karena ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah. Kendala serius yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.

2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi

Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank spot* di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk memenuhi amanah Pasal 28F Undang-

3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring)

Hingga akhir 2015, wilayah yang terlayani jaringan infrastruktur pitalebar adalah sebanyak 400 kab/kota dari total 514 kab/kota.

Saat ini, jangkauan pelayanan dari penyedia jasa layanan telekomunikasi masih berpusat di pulau jawa, sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk pulau-pulau lainnya, penyedia jasa layanan telekomunikasi tidak banyak, sehingga warga di daerah tersebut kurang memiliki akses untuk mendapat informasi. Penggunaan akses Rumah Tangga terhadap komputer secara nasional adalah 25,2 %, dimana Papua dan Maluku sebesar 16,07 %, Sulawesi sebesar 20.7 % serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 24 %. Sedangkan akses Rumah Tangga terhadap internet sebesar 22.2 %, dimana Papua dan Maluku sebesar 14,1 %, Sulawesi sebesar 17,1 % serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 16,2 %.

4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan



Edelman Trust Barometer pada awal 2015 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan meningkat 16% (dari 49% di 2014, menjadi 65% di 2015). Kepercayaan publik harus diperhatikan dengan baik. Jika masyarakat tidak melihat perubahan yang berarti maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun dengan cepat.

Survei LSI Januari 2015 menunjukkan penurunan kinerja pemerintah dengan tiga rapor merah (hukum, ekonomi, politik) dan dua rapor biru (sosial, keamanan). Dibandingkan data survei Agustus 2014, harapan atas kinerja pemerintah pada Januari 2015 merosot (dari 71,73% menjadi 42,29%).

Dua data survei di atas menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan instansi yang berperan sebagai *Public Relation* (PR), untuk menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat dan antar instansi pemerintah. Selain itu PR juga berfungsi sebagai penyedia informasi yang akurat sehingga dapat menjaga citra pemerintah di mata masyarakat, dan masyarakat dapat melihat kinerja positif pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan.

5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa



Visi Presiden tentang Revolusi Mental telah menjadi program nasional, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui

tentang apa dan bagaimana Revolusi Mental dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Minimnya penyebaran konten informasi tentang Revolusi Mental yang dilakukan pemerintah telah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk mendukung suksesnya program nasional Revolusi Mental. Terjadinya pergeseran karakter bangsa kearah negatif dan maraknya serbuan budaya asing tanpa disadari mulai menggerus budaya asli bangsa Indonesia.

Perlu ada gerakan perubahan untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu diperlukan revolusi mental untuk memperbaiki pola pikir masyarakat saat ini. Revolusi Mental merupakan upaya revitalisasi terhadap karakter dasar dari manusia Indonesia yang ramah, toleran, kekeluargaan, dan gotong royong.

Sedangkan tantangan dan potensi program USO yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi

Masyarakat di

187

Kecamatan (lokasi prioritas) di perbatasan



- Keterbatasan akses informasi
- Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan penyiaran
- Mahalnya biaya komunikasi
- Sinyal telekomunikasi negara tetangga lebih kuat dari sinyal lokal

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, pada tahun 2015—2019 terdapat 187 lokasi prioritas di 39 kab/kota wilayah perbatasan yang akan dilakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Permasalahan yang perlu segera di atasi antara lain yaitu: masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap informasi (media audio visual dan cetak); masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap jaringan telekomunikasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi; masih sulit dan mahal biaya komunikasi karena minimnya jumlah BTS yang dibangun (minim infrastruktur jalan, dan energi listrik); dan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga lebih kuat dari sinyal telekomunikasi NKRI. Hal-hal tersebut telah menyebabkan: rentannya nasionalisme; kurangnya akses informasi masyarakat perbatasan tentang Indonesia sehingga mudah terpengaruh dan dapat menimbulkan gangguan terhadap keutuhan NKRI; dan tidak berkembangnya ekonomi daerah sehingga mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU

10.473

SMK dan SMU di seluruh Indonesia



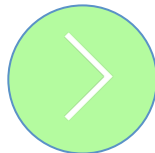
- Memerlukan ketersediaan akses internet
- Pemberdayaan TIK melalui e-literasi
- Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM Bidang komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan menyebutkan 10.473 SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Dari hasil survey mengenai presentase siswa yang mengakses internet di sekolah yang paling tinggi adalah di jenjang SMA (76,76%). Sedangkan di jenjang SD dan SMP sebesar 24,95% dan 69,10%. Pola persentase siswa yang mengakses internet di sekolah ini semakin besar seiring semakin tingginya jenjang pendidikan.

3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian

5.232

BP3K



Memerlukan ketersediaan akses internet

Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian, terdapat 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mencari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik berocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat.

4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan

230.000

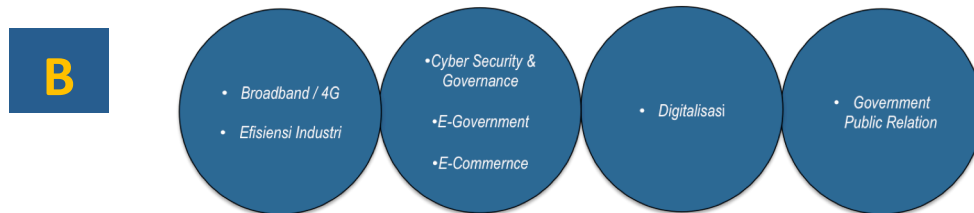
Nelayan dengan muatan perahu <30 GT



Belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika berada di tengah laut

Sesuai dengan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil (<30 GT) yang belum dilengkapi radio keselamatan ketika berada di tengah laut.

B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai *Leading Sector*



Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika adalah:

1. Masih Tingginya Harga Layanan Pitalebar

Kurangnya infrastruktur pitalebar dan belum optimalnya infrastruktur yang ada menyebabkan tingginya harga layanan pitalebar (*demand* lebih tinggi dari pada *supply*).

2. Potensi Kontribusi Pitalebar Terhadap Ekonomi

Indonesia

7,4%

PDB perkapita



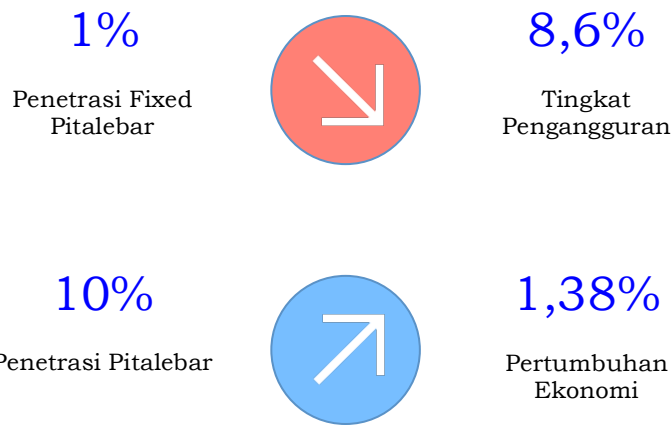
Negara Maju

<3%

PDB perkapita

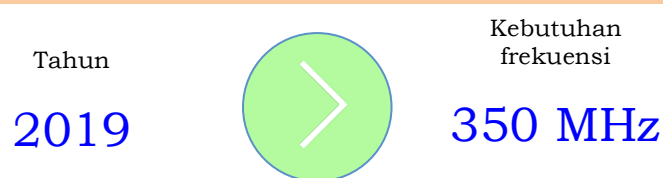
Harga layanan pitalebar di Indonesia masih 7,4% dari PDB perkapita. Sebagai perbandingan, harga layanan pitalebar di Negara maju tidak lebih dari 3% PDB perkapita masyarakatnya¹.

¹ Perpres 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia



Pitalebar yang berkembang pesat dan berinteraksi dengan ekonomi saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan ruang lingkup pitalebar sebagai *enabler* bagi perubahan struktural ekonomi menjadi semakin besar efeknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pitalebar berasal dari dampak pada pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, dan meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Dengan adanya penetrasi fixed pitalebar sebanyak 1% menghasilkan penurunan pengangguran sejumlah 8,6%². Meningkatnya penetrasi pitalebar sebanyak 10% juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38%³.

3. Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang Terbatas



Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada tahun 2019 Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar⁴.

² Katz. el. Al (2009)

³ World Bank

⁴ Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Potensi Pertumbuhan Layanan 4G LTE terhadap Peningkatan GDP, APBN dan Lapangan Kerja

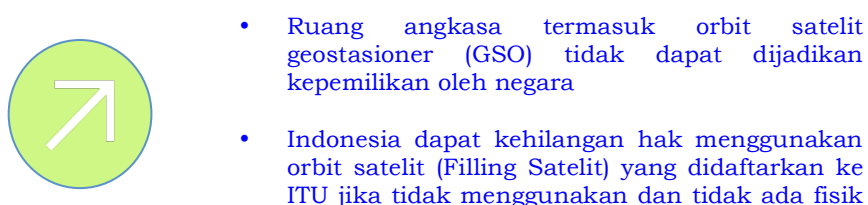


Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata spektrum frekuensi untuk keperluan layanan 4G *Long Term Evolution (LTE)*, penerapan teknologi 4G *LTE* diharapkan akan menghemat biaya infrastruktur secara signifikan. 4G *LTE* adalah teknologi yang diklaim sebagai jaringan nirkabel paling cepat pertumbuhannya dan didaulat untuk menggantikan *High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)*. Nantinya 4G *LTE* diharapkan beroperasi di frekuensi 700 Mhz yang memiliki jangkauan lebih luas dari frekuensi yang lain (2100, 2300, dsb).



Adanya akses yang lebih cepat berdampak pada peningkatan *Gross Domestic Product (GDP)* masyarakat, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan lapangan kerja.

5. Potensi Kehilangan Hak Penggunaan Slot Orbit

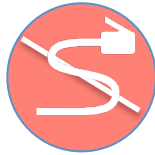


Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan fungsi satelit sangat vital dan strategis dalam membangun konektivitas nasional, karena satelit dapat menjangkau wilayah Indonesia yang belum terdapat infrastruktur telekomunikasi. Pemanfaatan satelit diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi, dan pertahanan.

6. Belum Terjangkaunya Seluruh Wilayah Indonesia dengan Jaringan Infrastruktur Pitalebar (Palapa Ring)

135

Kab/Kota



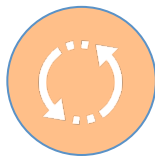
Belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi inisiatif pemerintah dan swasta berupa pembangunan serat optik di seluruh wilayah Indonesia yang menjangkau 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Proyek ini terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Melalui Palapa Ring diharapkan seluruh Indonesia terhubung dengan layanan pitalebar. Namun saat ini, 135 kabupaten/kota belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar⁵.

7. Belum Optimalnya Pemanfaatan NIX

19

NIX



Belum dimanfaatkan secara optimal

NIX adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Tujuan pembangunan NIX adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas, dan tarif layanan yang terjangkau (mengurangi biaya trafik nasional dan internasional sampai ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi), sehingga industri konten nasional dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada periode 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun NIX di 33 provinsi, namun baru 19 NIX yang beroperasi.

8. Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan Rendahnya Kualitas Layanan

Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak diikuti

⁵ RPJMN 2015-2019

dengan kualitas layanan yang baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR.

9. Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional

Infrastruktur
Telekomunikasi



Belum Efisien



Pendapatan sektor
telekomunikasi tidak
terdistribusi ke daerah-
daerah

Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena para penyelenggara telekomunikasi hanya fokus membangun di daerah yang layak secara komersial, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

10. Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Permohonan penggunaan spektrum frekuensi radio (Izin Stasiun Radio/ISR) yang dilakukan manual ditemukan banyak kendala antara lain, permohonan ISR melalui jasa perposan sering kali banyak diterima setelah Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Slot Orbit Satelit (Unit Pelayanan Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan penertiban, data permohonan ISR melalui jasa perposan sering tidak lengkap atau tidak jelas, terlambatnya penerbitan ISR, pendistribusian ISR melalui jasa pos ke UPT perlu waktu lama, kesalahan dalam pengiriman ISR. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah proses perizinan yang panjang berdampak kepada lama waktu proses permohonan ISR yang membutuhkan waktu maksimal 14 hari.

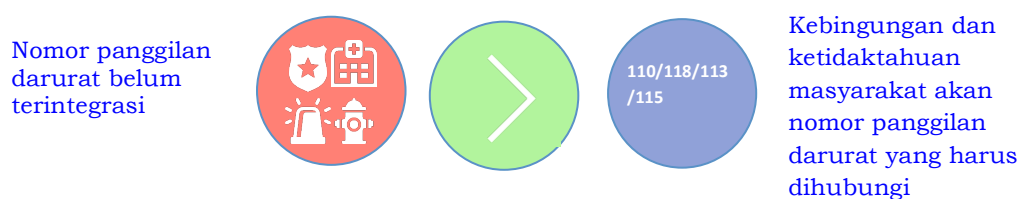
11. Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beredar di Indonesia



- Salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia
- Hilangnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan karena produksi alat dan perangkat telekomunikasi di luar negeri

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 20% untuk *Subscriber Station* (SS) dan 30% pada *Base Station* (BS). Masih kecilnya TKDN yang dipersyaratkan menyebabkan masih bergantungnya Indonesia terhadap impor alat dan perangkat telekomunikasi karena hanya sebagian kecil alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah diproduksi di dalam negeri. Pada tahun 2014, impor alat dan perangkat telekomunikasi mencapai Rp 67 triliun⁶ hal ini menjadi salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia dan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja dikarenakan produksi alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan di luar negeri. Dampak positif kebijakan TKDN adalah: kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi; peningkatan produk dalam negeri; pemicu peluang usaha industri kreatif; keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri.

12. Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat



Tidak terintegrasi dan kurangnya sosialisasi nomor panggilan darurat di Indonesia telah menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat mana yang harus dihubungi ketika terjadi kondisi darurat. Saat ini

⁶ BPS (2014)

terdapat beberapa nomor panggilan darurat yang di layani oleh instansi yang berbeda seperti 110 untuk bantuan kepolisian, 118 untuk ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan penataan dan integrasi nomor panggilan darurat menjadi nomor panggilan tunggal darurat yang dapat menjawab semua panggilan darurat yang sering dibutuhkan oleh masyarakat.

13. Maraknya *Spam*, *Fraud*, dan Kasus Penyalahgunaan *Refilling Trafik Terminasi Internasional*



1,2 T

Kerugian operator telekomunikasi akibat Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI)

Banyaknya simcard Prabayar yang beredar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membanjiri *inbox* dengan mengirimkan pesan yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan (*spam*). Pengguna layanan yang tidak bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya. Selain itu, penggunaan Sim Box untuk merekayasa sambungan internasional yang seharusnya menggunakan tarif internasional juga menjadi tarif lokal. Kasus penyalahgunaan Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) ini, menyebabkan kerugian pihak penyelenggara layanan telekomunikasi hingga mencapai Rp 1,2 triliun per tahun⁷.

14. Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal

>10 jt
unit

Ponsel ilegal baru



50 T

Transaksi industri ponsel pertahun



5 T

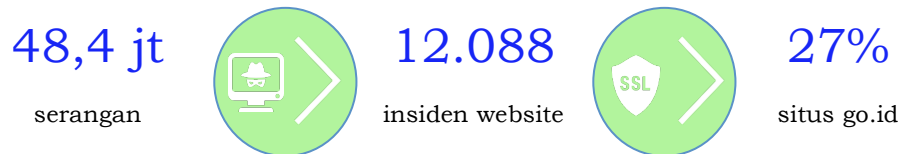
Potensi pendapatan Negara yang hilang dari PPN/ tahun

Demand terhadap perangkat telekomunikasi seluler yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan maraknya perangkat ilegal di Indonesia, karena konsumen menginginkan perangkat terbaru dengan harga murah. Setiap tahun beredar lebih dari 10 juta

⁷ Dit Pengendalian, Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika

unit perangkat telekomunikasi seluler ilegal, dengan transaksi industri ponsel per tahun mencapai Rp 50 triliun, dan diperkirakan sebanyak Rp 5 triliun⁸ dari pendapatan negara berpotensi hilang (PPN) akibat adanya perangkat telekomunikasi seluler ilegal. Oleh karena itu diperlukan registrasi IMEI (*International Mobile-station Equipment Identity*).

15. Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah)



Cyber security diartikan sebagai keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Cyber security bertujuan untuk membantu user untuk mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan informasi merupakan isu yang penting mengingat pada tahun 2014 terdapat 48,4 juta serangan di dunia maya dan situs yang paling banyak diserang adalah situs yang memiliki domain go.id⁹.

16. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan *e-government* antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional¹⁰.

⁸ APSI

⁹ ID SIRTII

¹⁰ RPJMN 2015-2019

17. Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet



Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet¹¹. Hal ini mendorong terciptanya *e-commerce* yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. *E-commerce* sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis¹². Pada tahun 2014, nilai transaksi *e-commerce* mencapai \$12 miliar atau Rp 150 triliun. Mengingat banyaknya peminat dan pemain dalam bidang ini, pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai \$24 miliar atau Rp 300 triliun.

18. Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan *Malware*

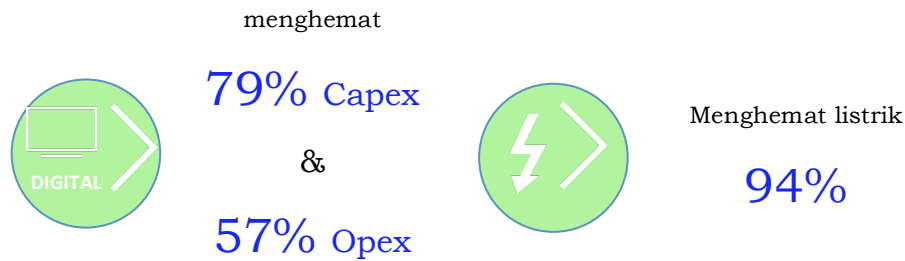


Maraknya konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam upaya penanganan konten ilegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional.

¹¹ Menkominfo, kominfo.go.id

¹² Laudon & Laudon 1998

19. Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri Penyiaran dan Membuka Peluang Usaha Baru



International Telecommunication Union (ITU) atau otoritas telekomunikasi internasional pada tahun 2006 batas akhir kepada seluruh negara di dunia agar paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran digital. Namun sebelumnya telah dilakukan uji coba di tahun 2006 yang hasilnya menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran yang akan diadopsi di Indonesia¹³.

Penyiaran TV Digital dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi; efisiensi infrastruktur industri penyiaran; dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Selain itu penerapan TV digital juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (*Capital Expenditure*) sebesar 79% dan biaya operasional (*Operational Expenditure*) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (*High Definition TV*).

Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penerapan TV digital namun masih menemui kendala antara lain:

- a. Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah kebawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM).

¹³ Kominfo, 2012:1

- b. Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya
- c. Belum diaturnya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran)

C1. Program Legislasi Nasional

Potensi dan permasalahan terkait dengan regulasi bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Revisi UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik, serta Berbagai Hal Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

Semakin bertambahnya pengguna Internet, termasuk makin besarnya jumlah penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi internet, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. UU No. 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.

2. Perlunya Revisi UU Penyiaran Terkait Industri Penyiaran yang Sehat dan Sesuai dengan Karakter Bangsa

Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Media penyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh dalam membangun kesan/opini publik dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidak berdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayangan berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, serta reality show merupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasar dalam

menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutama televisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating dan share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka program televisi cenderung memuat konten yang kurang edukatif dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut menentukan rating dan share, hingga mendorong media untuk memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsa sebanyak-banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat.

Selain itu Indonesia juga menghadapi permasalahan tren monopoli atau penguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur penyelenggaraan industri penyiaran yang sehat, serta konten siaran yang sesuai dengan karakter bangsa.

3. Perlunya RUU RTRI Terkait Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik

UU Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan lembaga penyiaran publik dalam menjawab perkembangan dan tantangan dengan lembaga penyiaran yang lain. Bentuk kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI sebagai badan hukum dianggap tidak jelas sehingga mengalami kesulitan dalam dukungan APBN. Adanya pandangan tentang pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang masih menggunakan mata anggaran 99 yang merupakan mata anggaran lain-lain sehingga tidak ada kewenangan bagi LPP RRI dan LPP TVRI untuk mengelola anggaran secara tersendiri mengingat LPP RRI dan LPP TVRI bukan merupakan satuan kerja secara tersendiri. Manajemen Dewan LPP RRI dan LPP TVRI dirasakan sangat dominan dalam pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI serta lemah dalam mewakili kepentingan publik. Adanya fenomena Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai kepegawaian di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga sudah lebih dari 15 tahun belum dapat melakukan recruitment SDM kreatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa LPP RRI dan LPP TVRI harus dikeluarkan dari substansi dalam UU Penyiaran dan disusun undang-undang yang mengatur tentang penggabungan antara LPP RRI dan LPP TVRI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI).

4. Perlunya Regulasi Perlindungan Data Pribadi; Migrasi Analog ke Digital; Konvergensi Telematika (Telekomunikasi); dan Pos

Urgensi penyusunan RUU Perlindungan Data dan informasi Pribadi adalah karena perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai wujud penegakan hak asasi manusia, perlunya penegasan hak subjek data atas pengelolaan data pribadi, serta sebagai upaya menciptakan *good governance* dan *clean government*.

Urgensi penyusunan RUU Migrasi Televisi Terrestrial dari Analog ke Digital adalah untuk mengatur spesifik terkait migrasi penyelenggaraan penyiaran analog ke digital, dan sebagai payung hukum *analog switch off*.

Urgensi penyusunan RUU Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi) adalah karena pesatnya perkembangan TIK yang menuntut pembaruan pola pikir pada kebijakan tersebut.

Urgensi penyusunan Revisi UU Pos adalah untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pos, dan pelaksanaan pelayanan pos universal (menghadapi pembukaan akses pasar).

C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Potensi dan permasalahan terkait program internal Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai reformasi birokrasi dan revolusi mental adalah:

1. Transformasi Birokrasi Belum Terwujud Secara Nyata

Perubahan yang signifikan telah terjadi dalam tatanan pemerintahan. Pemerintah tidak saja harus mau dan bisa menerima kritik dan tuntutan tugas oleh reformasi, dengan pemangkasan wewenang dan berbagai tugas baru yang mana dalam hal ini pemerintah benar-benar harus melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan juga pemerintahan yang bersih (*clean government*), yang dalam pencapaiannya harus ada perubahan mendasar mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan *mind-set* para pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai ke pegawai (bawahan). Salah satu penyebab belum terwujudnya reformasi karena transformasi birokrasi belum terwujud secara riil. Reformasi total tidak akan terjadi sebelum dilakukan perbaikan kinerja birokrasi. Namun, perbaikan kinerja tersebut tidaklah cukup dilakukan secara *Ad-*

hoc atau parsial. Maka dari itu, konsep “*change management*” harus dipikirkan sebagai usaha mereformasi birokrasi secara mendasar, sehingga meningkatkan kinerja organisasi dan individu.

Pemikiran tentang *good governance* sebagai paradigma baru manajemen pembangunan menjadikan pemerintah sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa melalui kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta peran perencanaan dan penganggaran. Dalam *good governance*, tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat berperan dalam pemerintahan, sehingga masyarakat akan terlibat untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap seluruh tindakan pemerintah.

2. Belum Adanya Riset Mengenai Dampak Sosial Ekonomi Terkait Implementasi Pitalebar Dalam Rangka Mempersiapkan Tenaga Kerja

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum adanya riset mengenai dampak sosial dan ekonomi atas perkembangan TIK khususnya pitalebar untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan TIK khususnya pitalebar.

Ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014—2019, bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi perluasan, percepatan, pembangunan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dengan dimulainya pembangunan pitalebar Indonesia, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah persiapan antara lain dengan melakukan kajian tentang kesiapan SDM angkatan kerja dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman (jika ada) dari agenda rencana pembangunan pitalebar Indonesia.

3. Perubahan Paradigma Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan internal yang selama ini dilakukan masih menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat *watchdog* (*mengungkap temuan*), reaktif, post-audit, korektif, kaku, dan pasif sudah tidak relevan dilakukan, karena yang seharusnya dihindari adalah adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, sehingga diperlukan suatu paradigma baru dalam mekanisme pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN



2.1 Rumusan

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.



2.2 Rumusan Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



2.3 Tujuan

Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar-wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa



2.4 Sasaran Strategis

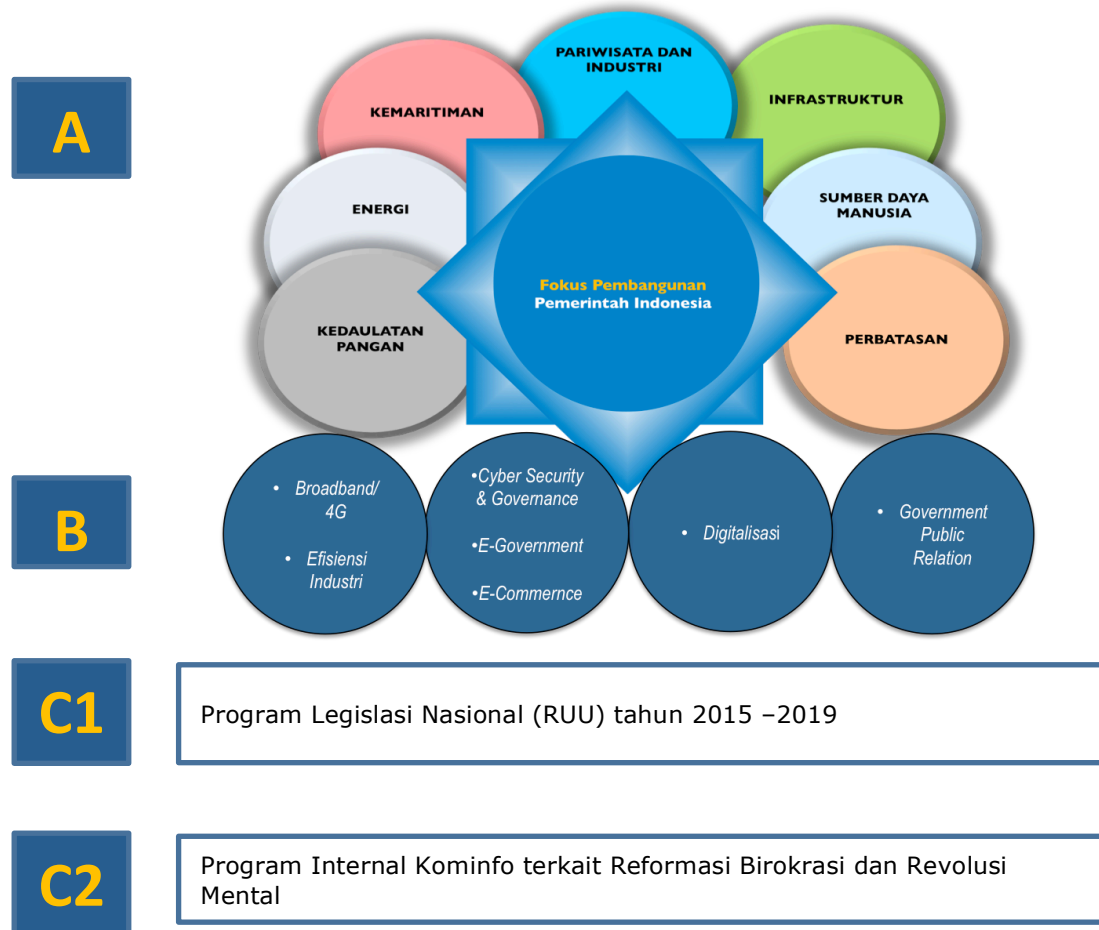
Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

- A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan.
- B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor* dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
- C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.

- D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara



Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut :

- SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
- SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
- SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (*bandwidth*) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi.

Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%.

Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda

prioritas yang disebut Nawacita yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMN Tahun 2015—2019, yaitu:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6.

NAWACITA-2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dalam RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 5 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :

1. melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
3. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
4. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); dan
5. meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 3), 4) dan 5).

Sub Agenda 3 Nawacita-2: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan open e-government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

Sub Agenda 4 Nawacita-2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan

penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Sub Agenda 5 Nawacita-2: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik

Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya open government pada seluruh instansi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain:

1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;

- j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP);
 - k. Dewan Pers; dan
 - l. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015—2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan antara lain :

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi-informasi.
2. Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara

NAWACITA-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, di RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 11 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :

1. membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
2. membangun transportasi umum masal perkotaan;
3. membangun perumahan dan kawasan pemukiman;
4. peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
5. penguatan investasi;
6. mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
7. peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
8. akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
9. pengembangan kapasitas perdagangan nasional;
10. peningkatan daya saing tenaga kerja; dan
11. peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus ekonomi tahun 2016.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 1).

Sub Agenda 1 Nawacita-6: Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

Beberapa sasaran yang ingin diwujudkan untuk membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO;

2. tersedianya layanan pitalebar dengan tujuan:
 - a. terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;
 - b. tingkat penetrasi *fixed pitalebar* di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
 - c. tingkat penetrasi *mobile pitalebar* (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
3. pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
 - a. migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (*analog switch off*); dan
 - b. tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar.
4. tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen; dan
5. tersedianya layanan *e-Government* dan dikelolanya data sebagai asset strategis nasional melalui:
 - a. indeks *e-Government* nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
 - b. jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen.

Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi *pitalebar-ready* dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
 - a. Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi;
 - b. Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);
 - c. Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
 - d. Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi *pitalebar*;

- f. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: *spektrum sharing, spektrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO)*;
 - g. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
 - h. Mengkaji pembangunan satelit *pitalebar* nasional;
3. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
- a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur TIK serta ekosistem TIK yang merata di seluruh wilayah adalah:

- a. Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring
- b. Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota
- c. Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO
- d. Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri
- e. Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional
- f. Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan
- g. Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional
- h. Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK
- i. Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar
- j. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e-transportasi.

2. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada masyarakat Indonesia terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah :

- a. Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah
- b. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
- c. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
- d. Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia.

3. Mewujudkan Tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif adalah:

- a. Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
- b. Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.



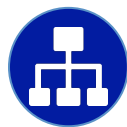
3.3 Kerangka Regulasi

Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR akan menyusun beberapa regulasi sebagai berikut:

NO.	JUDUL RUU	RENCANA PEMBAHASAN					KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	✓					Inisiatif Pemerintah
2	RUU tentang Radio Televisi Indonesia	✓					Inisiatif DPR
3	RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	✓					Inisiatif DPR
4	Rancangan UU tentang Perlindungan Data Pribadi		✓				Inisiatif Pemerintah
5	RUU Tentang Penyiaran		✓				Inisiatif Pemerintah
6	RUU tentang Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi)			✓			Inisiatif Pemerintah
7	Rancangan UU tentang Tata Cara Intersepsi				✓		Inisiatif Pemerintah

Selain matriks diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyusun:

- Regulasi penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel, Kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika
- RPP PDES, Peraturan perundang-undangan di bidang e-Business, Regulasi/kebijakan di bidang e-Government, Peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK, Peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika, Kebijakan/ regulasi Keamanan Informasi
- Rancangan regulasi SKKNI bidang kominfo
- Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik, Kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik, Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA, Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi, Perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional.



3.4 Kerangka Kelembagaan

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Perubahan pola rezim perijinan ke rezim pelayanan
2. Arah dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang fokus kepada sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan komunikasi dan informatika
4. Tata laksana dan sumber daya Aparatur Sipil Negara.

2. Penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan poin di atas, maka akan dilakukan penataan pada organisasi pusat, dan unit pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah, serta penguatan SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah penguatan kelembagaan antara lain:

1. Dalam rangka percepatan implementasi teknologi *pitalebar* dan pengembangan ekosistemnya perlu dibentuk organisasi unit eselon II yang khusus menangani *pitalebar*.
2. Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagai eksekutor dari penyediaan infrastruktur TIK di daerah non komersial (USO) yang selama ini merupakan Unit Kerja Eselon III, perlu ditingkatkan kapasitasnya mengingat tanggung jawab dan luasnya lingkup pekerjaan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



4.1 Target Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		2015	2016	2017	2018	2019
SS.1	Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia					
IKSS.1.1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)	78	82	86	90	93
IKSS.1.2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)	20	40	60	80	100
IKSS.1.3	Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri memperoleh akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri : 19.000 Desa)	-	-	2.6	6.3	10

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		2015	2016	2017	2018	2019
IKSS.1.4	Persentase (%) kecamatan di kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi <i>(Jumlah lokpri kawasan perbatasan: 187 kecamatan)</i>	30	50	60	80	100
IKSS.1.5	Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita	9,9	8,6	7,3	6,6	4,5
IKSS.1.6	Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/ <i>Analog Switch Off (ASO)</i>	35	50	70	80	100
IKSS.1.7	Persentase (%) nelayan dan petani <i>go digital</i> <i>(Jumlah petani + nelayan per tahun 2013: 28,7 Juta)</i>	0,7	1,4	2,1	2,8	3
IKSS.1.8	Persentase (%) UMKM <i>go digital</i> <i>(Jumlah UMKM per tahun 2012: 56 juta)</i>	9	11	13	16	20

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		2015	2016	2017	2018	2019
IKSS.1.9	Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital <i>(Jumlah desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri: 19.000 Desa)</i>	-	-	2.6	6.3	10
SS.2	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia					
IKSS.2.1	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik <i>(Survei Responden/Publik)</i>	30	40	50	60	70
SS.3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif					
IKSS.3.1	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS.3.2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	A	A	A	A
IKSS.3.3	Nilai akuntabilitas kinerja	B	A	A	A	A

Adapun Indikator Kinerja Utama Kemkominfo adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama		2015	2016	2017	2018	2019
SS.1	Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia					
IKU.1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)	78	82	86	90	93
IKU.2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)	20	40	60	80	100
SS.2	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia					
IKU.3	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)	30	40	50	60	70
SS.3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif					
IKU.4	Indeks Reformasi Birokrasi	B	A	A	A	A



4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2015-2019 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non BLU), PNBP BLU dan juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Selain sumber pendanaan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti pembangunan Palapa Ring.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dalam rangka perbaikan kualitas perumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang sebelumnya masih berorientasi proses menjadi berorientasi hasil dan lebih menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kementerian. Selain itu juga Perubahan Renstra Tahun 2015-2019 diharapkan dapat lebih menjawab potensi dan tantangan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi ke depan yang dinamis. Program Kerja yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan tahun 2016 akan dikompensasi pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2015—2019 (perubahan) ini. Perubahan Rencana strategis tahun 2015—2019 dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2015—2016 dengan menyelaraskan visi dan misi Jalan Perubahan yang diusung pemerintahan saat ini melalui program prioritas Nawacita, Rencana Kerja Pemerintah, serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global.

Target pencapaian Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 (perubahan) menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis ini perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKj) dan juga melalui Sistem Pengawasan dan Monitoring Program Kerja Prioritas.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

RUDIANTARA

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059			KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5,117,949.83	4,753,585.51	4,918,204.93	5,088,531.63	19,878,271.9	
059	06		Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika						1,011,106.00	756,973.57	782,792.06	809,493.26	3,360,364.9	
				Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia										
				Persentase Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE	40%	60%	80%	100%						
				Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	30%	50%	70%	100%						
				Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	92%	93%	94%	95%						
				Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	92%	93%	94%	95%						

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan										
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	80	82	82	82						
				Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	8.6	8.7	8.7	8.7						
059	06	3052	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika						35,692.55	35,065.83	36,258.00	37,490.81	144,507.2	
				Layanan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi										
				Persentase (%) layanan pengujian perangkat pos dan telekomunikasi	90%	90%	90%	90%						

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG												
					Persentase (%) kesesuaian laboratorium pengujian dan kalibrasi dengan persyaratan teknis dan standar ITU	90%	90%	90%	90%					
					Persentase (%) jumlah hasil kalibrasi perangkat pos dan informatika	90%	90%	90%	90%					
				Layanan Dukungan Teknis BBPPT										
				Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis		12 Bln/ Layanan	12 Bln/ Layanan	12 Bln/ Layanan	12 Bln/ Layanan					
				Layanan Internal (Overhead)										
				Layanan Perkantoran										
059	06	3053	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika							408,269.70	351,361.72	363,271.13	375,585.33	1,498,487.9
				Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio										
					Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi.	90%	90%	90%	90%					

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG												
					Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio	90%	90%	90%	90%					
				Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen SDPPI										
				Jumlah Layanan Internal		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
				Layanan Internal (Overhead)										
				Jumlah Layanan Internal		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
				Layanan Perkantoran										
				Jumlah Layanan Internal		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
059	06	3054	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit							23,717.69	27,808.06	28,781.34	29,788.69	110,095.8
				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat										
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan frekuensi radio		8,0	8,0	8,0	8,0					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan sertifikasi operator radio	8,0	8,0	8,0	8,0					
				Layanan Perijinan Penggunaan Frekuensi Radio										
					Persentase (%) pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang tepat waktu sesuai Standar ISO 9001 (termasuk layanan M2M)	85%	87%	90%	92%					
				PNBP Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio										
					Persentase (%) pencapaian target PNBP	100%	100%	100%	100%					
				Layanan Sertifikasi Operator Radio										
					Persentase (%) pelayanan operator radio yang bersertifikat tepat waktu	85%	87%	90%	92%					
059	06	3055	Pengendalian Pemanfaatan Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika							227,332.89	56,604.22	58,585.37	60,635.86	403,158.3
				Operasional Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan aplikasi layanan on line SIMS	90%	97%	100%	100%					
					Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	80% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)	81% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)	83% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)	85% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)					
				Layanan Monitoring dan Evaluasi Penertiban Perangkat dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio										
					Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	92%	93%	94%	95%					
					Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	92%	93%	94%	95%					
059	06	3056	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit							20,362.18	25,355.16	26,242.59	27,161.08	99,121.0

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan penataan spektrum frekuensi										
					Persentase (%) spektrum frekuensi yang tertata optimal untuk mendukung 4G LTE	30%	50%	70%	100%					
					Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%	100%	100%					
				Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio dan Notifikasi Penggunaan Stasiun Radio										
					Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio	40	45	50	55					
					Laporan Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio di perbatasan Negara		4	4	4					
				Kebijakan/Regulasi Bidang Penataan Spektrum Frekuensi Radio										
					Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum Flexibility)	30%	50%	70%	100%					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial	50%	70%	100%	100%					
					Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim dari analog ke digital	30%	50%	70%	100%					
					Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau PPDR (Public Protection Disaster Relief)	30%	50%	70%	100%					
					Persentase (%) Partambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	30%	50%	70%	100%					
059	06	3057	Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika							25,725.40	17,920.90	18,548.13	19,197.31	81,391.7
				Kebijakan Bidang Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika										
					Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	10 draft	15 Draft	15 draft	15 draft					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan Pengelolaan Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika										
					Jumlah Layanan Pengelolaan Standardisasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
				Standar dan Sertifikat Perangkat Pos dan Informatika										
					Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	72%	75%	78%	80%					
059	06	3058	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika							270,005.60	242,857.68	251,105.50	259,634.18	1,023,603.0
				Layanan Dukungan Manajemen Eselon I										
					Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok					
					Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian	33 dok	33 dok	33 dok	33 dok					

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG												
					Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok					
					Jumlah laporan pelaksanaan keuangan	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok					
				Layanan Internal (Overhead)										
					Jumlah Layanan Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
				Layanan Perkantoran			12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan					
059	07		Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika							3,195,058.06	2,830,820.85	2,929,716.00	3,032,066.80	11,987,661.7
				Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial										
					Persentase tersedianya ekosistem pendukung akses broadband & penyiaran		100%	100%	100%					
					Persentase Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik palapa ring	82%	86%	90%	93%					

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG												
					Persentase desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi	-	3%	6%	10%					
					Persentase kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi	50%	60%	80%	100%					
					Persentase desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital	-	2.60%	6.30%	10%					
				Terciptanya industri TIK dan penyiaran yang efisien dan berkelanjutan melalui Konsolidasi di sektor TIK dan sektor penyiaran										
					Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi		1 Dokumen							
					Jumlah Dokumen RUU Pos		1 Dokumen							
					Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran		1 Dokumen							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase terselesainya kebijakan untuk mendorong sektor TIK dan Penyiaran (Kebijakan network sharing/infrastruktur sharing, regulasi IMEI/Kartu perdana, kemitraan, keterbukaan akses, modern licensing dan digitalisasi)		50%	70%	100%					
				Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia										
				Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi		36 Lokasi								
				Persentase implementasi digitalisasi penyiaran/AnalogSwitch Off (ASO)		50%	70%	80%	100%					
				Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos	2335	2385	2390	2395					
					Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan & tertinggal di Indonesia	73	-	-	-					
059	07	3060	Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran							2,572,617.60	2,569,740.10	2,659,670.51	2,752,748.17	10,554,776.4
				Akses Layanan TIK dan Penyiaran										
					Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi	24	335							
				Layanan Dukungan Ekosistem TIK										
					Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan sistem layanan Nomor tunggal panggilan darurat (akumulasi)		210							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah Desa Broadband		250							
				Satelit Multifungsi										
					Persentase (%) Persiapan penyediaan satelit multifungsi									
				PNBP BLU BPPPTI										
					Persentase (%) tercapainya target PNBP		100%							
				Jaringan Tulang Punggung Serat Optik										
					Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional		87%							
				Layanan Penyelesaian Kontrak Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) Penyelesaian perselisihan Kontrak Layanan Akses Telekomunikasi dan Informatika		100%							
					Persentase (%) penanganan permasalahan hukum		100%							
				Layanan Internal (Overhead)										
					Persentase (%) penyelenggara tugas dan fungsi	100%	100%	100%	100%					
					Persentase (%) terpenuhinya Perangkat Pengolah Data, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100%	100%	100%	100%					
				Layanan Perkantoran										
					Persentase (%) Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	100%	100%	100%	100%					
059	07	3061	Pengembangan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran							401,898.00	70,214.78	72,672.30	75,215.83	620,000.9
				Kebijakan / Regulasi Infrastruktur Pengembangan Pita Lebar			9 Dokumen							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah Dokumen Kebijakan / Regulasi Infrastruktur Pengembangan Pita Lebar		9							
				Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar		20 Lokasi								
					Jumlah Dokumen Persiapan dan Perencanaan Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar		9							
					Jumlah Pusat Data Sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat		1							
					Jumlah Pusat Data Sistem Diseminasi Informasi Kebencanaan		1							
					Jumlah Lokasi LPP TVRI yang Mendapatkan Sarana Prasarana Pendukung		18							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar		400%							
059	07	3062	Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika							21,523.82	18,282.48	18,922.37	19,584.65	78,313.3
				Layanan Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran										
					Persentase (%) pencapaian target PNPB dari BHP Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%					
					Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Pos	75%	80%	85%	90%					
					Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi	75%	80%	85%	90%					
					Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	75%	80%	85%	90%					
					Persentase (%) kepatuhan : LPB dan LPS	75%	80%	85%	90%					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019	
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
					Persentase (%) verifikasi TKDN dalam penyelenggaraan telekomunikasi sesuai amanat regulasi	100%	100%	100%	100%						
					Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular	75%	80%	85%	90%						
					Persentase (%) kepatuhan penyelenggara Pos dan Informatika		80%	85%	90%						
059	07	3063	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos							30,671.66	16,096.60	16,659.98	17,243.08	80,671.3	
				Kebijakan / Regulasi di Bidang Pos											
					Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos	100% Pembahasan antar kementerian draft Revisi UU Pos	100% Harmonisasi Draft Revisi UU Pos	100% Pembahasan Draft Revisi UU Pos dengan DPR							
					Persentase (%) penyusunan materi kebijakan dan regulasi pendukung bidang Pos	70%	100%	100%							
				Layanan Pos											

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah KPCLPU	2335	2390	2345	2350					
					Persentase(%)Verifikasi Pemantauan terhadap layanan pos, pelaksanaan tarif LPK dan LPU	100%	100%	100%	100%					
				Layanan perijinan bidang pos										
					Persentase(%)Penanganan Permohonan Layanan Perizinan Bidang Pos	100%	100%	100%	100%					
				Layanan pembinaan prangko dan filateli										
					Jumlah tema dan Penerbitan Prangko	15	15	15	15					
					Persentase(%)Pemanfaatan dan Pembinaan Filateli di tingkat Propinsi, Kab/Kota	100%	100%	100%	100%					
059	07	3064	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi							36,064.56	17,155.37	17,755.81	18,377.26	89,353.0

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Kebijakan / Regulasi di Bidang Telekomunikasi										
					Jumlah Draft Kebijakan / Regulasi Telekomunikasi		12							
				Layanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi										
					Persentase (%) Permohonan Izin Yang Ditangani Sesuai Dengan Standar ISO	100%	100%	100%	100%					
059	07	3065	Pembinaan dan pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran							18,506.36	18,565.82	19,215.62	19,888.17	76,176.0
				Layanan Perizinan di Bidang Penyiaran										
					Persentase (%) Penanganan Proses Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi	100%	100%	100%	100%					
				Digitalisasi Penyiaran										

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital		100%							
				Kebijakan / Regulasi di Bidang Penyiaran			5 dokumen							
					Jumlah Penyusunan Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penyiaran		5							
059	07	3066	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika							113,776.05	120,765.70	124,819.41	129,009.64	488,370.8
				Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			Layanan							
					Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi dan data	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen					
					Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan kerjasama serta bantuan hukum		7							
					Jumlah Laporan pelaksanaan keuangan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan					

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG												
					Jumlah laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian		9							
				Layanan Internal (Overhead)										
					Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		1							
				Layanan Perkantoran										
					Gaji dan Operasional Perkantoran		12							
059	08		Program Pengembangan Aplikasi Informatika							236,590.80	386,654.31	400,082.23	413,976.87	1,437,304.2
				Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan TIK dan aplikasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan sektor-sektor strategis pemerintah										
					Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan arsitektur e-Government Nasional		100% (arsitektur)							
					Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai 3,4 (skala 4.0)		2.9	3.2	3.4					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah peraturan perundangdi bidang aplikasi informatika		4							
					Persentase (%) nelayan dan petani go digital	1,4%	2,1%	2,8%	0					
					Persentase (%) Kab/kota tersedia akses terhadap inkubator digital	10%	50%	70%	100%					
					Jumlah Startup Digital	400	600	800	1000					
					Persentase (%) UMKM go digital	1,4%	2,1%	2,8%	3%					
059	08	3029	Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis							146,754.93	267,192.00	276,543.72	286,222.75	976,713.4
				Kebijakan / Regulasi bidang E-Business		3 dokumen								
					Jumlah dokumen Kebijakan / Regulasi di bidang e-business diserahkan ke Dirjen Aptika		3							
				Layanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE)		1 layanan								
					Jumlah Tanda Daftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang diterbitkan		100							
				Layanan pemberian Domain.ID Gratis										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah domain berbasis .id untuk UMKM, sekolah dan Komunitas	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000					
				Layanan penciptaan Startup Digital										
					Persentase (%) Kab/kota tersedia akses terhadap inkubator digital	10%	50%	70%	100%					
					Jumlah Startup Digital	400	600	800	1000					
				Sistem Pemblokiran Konten Negatif yang Efektif		1 Sistem								
					Tersedianya Sistem pemblokiran konten negatif yang efektif		1							
059	08	3030	Pembinaan dan Pengembangan E-Government							13,606.42	14,435.11	14,940.33	15,463.25	58,445.1
				Kebijakan / Regulasi CIO Nasional										
					Draft RPM Pedoman Government CIO Nasional sudah diuji publik		1 RPM							

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG												
				Masterplan dan Arsitektur e-Government Nasional										
					Tersedianya Dokumen Masterplan dan Arsitektur e-Government Nasional		1 Dokumen Blueprint							
					Persentase implementasi Roadmap e-Government tahap II		1							
					Persentase implementasi aplikasi e-pemerintahan, e-pengadaan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e-transportasi	10%	50%	70%	100%					
					Tersedianya dokumen Data Center Nasional dan sistem pendukungnya		1 Dokumen							
				Sistem Elektronik dan Data Strategis Nasional yang Terintegrasi										
					Terintegrasinya sistem elektronik dan data strategis nasional		2 Laporan							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	08	3031	Pembinaan, Pengembangan Kemitraan Industri Informatika							6,866.65	11,804.00	12,217.14	12,644.74	43,532.5
				Fasilitasi Layanan Industri Informatika										
					Jumlah Roadmap Pemberdayaan Industri Informatika		1 Dokumen							
					Jumlah Prototype Ekosistem Appstore Nasional		1 Prototype							
					Jumlah co-working space		3 lokasi							
					Jumlah E-Katalog Software Indonesia		1 Aplikasi							
					Jumlah Dukungan Data Ekonomi Kerakayatan		1 Dokumen							
				Layanan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik										
					Jumlah Pelaksanaan sosialisasi audit penyelenggaraan sistem elektronik		80 PSE							
					Jumlah Desain dashboard layanan audit penyelenggaraan sistem elektronik		1 dokumen							
					Jumlah Implementasi audit penyelenggaraan sistem elektronik		4 PSE							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Implementasi TIK Ramah Lingkungan (Green ICT) di Kabupaten/Kotadan Lokasi Industri										
					Jumlah Kabupaten/Kota dan Industri yang mendapatkan Edukasi TIK Ramah Lingkungan (Green ICT)		8 Kabupaten/kota							
					Jumlah Kabupaten/Kota dan Industri yang mengikuti Green Rating		6 lokasi industri							
				Layanan Fasilitasi promosi produk dan jasa TIK										
					Jumlah Fasilitasi dan promosi produk industri TIK lokal		1							
					Jumlah Fasilitasi Implementasi Embedded Software Lokal Klip OS di Instansi Pemerintah dan BUMN		2 instansi							
					Jumlah Fasilitasi Keikutsertaan dan Penyelenggaraan AICTA		1							
					Jumlah Fasilitasi Perundingan Kerjasama Jasa TIK pada Fora Internasional		1							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah Game yang terklasifikasi dan jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi permainan interaktif elektronik		500 game 1000 peserta							
059	08	3032	Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat							13,274.51	11,500.00	11,902.50	12,319.09	48,996.1
				Agen Perubahan Informatika		14000 agen perubahan informatika								
					Jumlah agen perubahan informatika yang didedikasi		14000 agen perubahan informatika							
				Sistem Whitelist Nusantara		94.000 data dan 150 institusi pendidikan/pesantren								
					Jumlah data whitelist		94000 data							
					Jumlah implementasi sistem whitelist nusantara pada institusi pendidikan / pesantren		150 institusi							
059	08	3033	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi							15,620.67	34,195.00	35,391.83	36,630.54	121,838.0

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif			1							
					Persentase (%) penanganan aduan situs internet bermuatan negatif		1							
				Layanan Penanganan Insiden Keamanan Informasi			1							
					Jumlah kegiatan penanganan insiden keamanan informasi		100							
				Layanan Manajemen Pengamanan Sistem Elektronik yang Berstandar Internasional			5							
					Jumlah Penyelenggaraan manajemen pengamanan sistem elektronik		5							
				Layanan Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional			10000							
					Jumlah Sertifikat Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional (SiVion)		10000							
					Jumlah pemilik tanda tangan digital	11.000	350.000	700.000	1.000.000					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Kebijakan Perlindungan Infrastruktur Informasi bagi Sektor Strategis			1							
					Draft Kebijakan yang sudah di Uji Publik		1							
				Penerapan Keamanan Informasi oleh Instansi Penyelenggara Layanan Publik			45							
					Jumlah Instansi yang mengikuti pemeringkatan indeks KAMI		45							
				Kebijakan di Bidang Keamanan Informasi			2							
					Jumlah Draft Kebijakan (RPM) yang sudah diuji publik		2							
				Layanan Penegakan Hukum UU ITE			7							
					Jumlah Penegakan Hukum Undang-Undang ITE		7							
				Pemantauan Jaringan Internet pada ISP/NAP/IX/ titik strategis lainnya melalui sistem deteksi dini			49							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya yang terpantau		49							
059	08	3034	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika							40,467.62	47,528.20	49,086.71	50,696.50	187,779.0
				Peraturan perundangan dibidang aplikasi informatika		3 regulasi								
					Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE		100%							
					Persentase penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara Intersepsi		0.6							
					Jumlah Peraturan Menteri		100%							
				Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		4 dukungan								

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan		7							
				Layanan Internal (Overhead)										
					Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1 Paket							
					Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		1 Paket							
				Layanan Perkantoran			12 bulan layanan							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	09		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik							161,696.46	180,845.56	187,002.44	193,369.47	722,913.9
				Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik										
				Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi	159 dari total target 548 prov/kab/kota	1								
				Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi	96% Dari total 1875 peserta sebanyak 1800 peserta atau 96% paham/meningkat pemahamannya terhadap isu/tema yang disampaikan pada forum tersebut (hasil kuesioner)	0								
				Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi	311 Konten Informasi & Publikasi (Infografis: 119, Videografis: 157, Buku: 13 Judul, Komunika: 9 Edisi, Jurnal Dialog: 1 Edisi, Advetorial: 12 Judul)	10%								
				Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah;	40%	60%	80%	100%						
				Persentase (%) konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan berkualitas baik	40%	60%	80%	100%						

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat, tepat dan obyektif	40%	60%	80%	100%					
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik										
					Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik	135 Media Center Aktif atau 77% dari total 175 media center yang dipantau (dibuktikan dengan kontribusi media center dengan mengirim berita, konten berita ke infopublik)	90%							
					Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis	20% 10 kemitraan yang telah terlaksana dari target 50 kemitraan dengan lembaga/Media strategis	75%							
059	09	3044	Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional							9,284.43	12,700.00	13,144.50	13,604.56	48,733.5
				Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik										
					Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP	3500	2000	2000	2000					
				Kebijakan / Regulasi Bidang Komunikasi Publik										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) tersusunnya Regulasi / Kebijakan Bidang Komunikasi Publik		5	5	5					
				Layanan Pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik										
					Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya		200	200	200					
					Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP		200	200	200					
					Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik		100	100	100					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	09	3045	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi							11,541.80	15,436.00	15,976.26	16,535.43	59,489.5
				Konten Informasi Publik bertema Prioritas Nasional		300	300	300						
				Jumlah hasil analisis konten media bertema prioritas nasional		300	300	300						
				Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis dan Infografis informasi publik		35	35	35						
				Jumlah konten informasi publik bertema Prioritas Nasional		20	20	20						
				Konten Informasi Publik bertema Khusus		20	20	20						
				Jumlah konten informasi publik Revolusi mental		20	20	20						
059	09	3046	Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik							28,034.04	23,200.00	24,012.00	24,852.42	100,098.5

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan Informasi Publik bertema khusus yang disebarakan melalui media publik (online, medsos, TV, radio, videotron dan media cetak)										
					Jumlah penyebaran informasi publik bertema khusus melalui media publik (online, medsos, TV, radio, videotron dan media cetak)		160	160	160					
					Jumlah diseminasi informasi terkait tema revolusi mental melalui Media Petunra		12	12	12					
				Layanan Informasi Publik bertema Program Prioritas Pemerintah yang disebarakan melalui media publik (online, medsos, TV, radio dan surat kabar)										
					Jumlah Pengelolaan Portal Berita Infopublik dan Media Center		12	12	12					

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah Sosialisasi program prioritas pemerintah melalui media massa (penyiaran dan cetak)		35	35	35					
					Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi PSO Bidang Pers Perum LKBN Antara		12	12	12					
				Pembangunan Media Center										
					Jumlah Seleksi Daerah Calon Penerima Bantuan Media Center melalui Monitoring dan Evaluasi		25	25	25					
					Jumlah Pengadaan Sarana Media Center Daerah		25	25	25					
					Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan Media Center		4	4	4					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	09	3047	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi							17,844.76	35,300.00	36,535.50	37,814.24	127,494.5
				Kemitraan dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam rangka efektifitas penyebaran informasi publik										
					Jumlah tenaga humas pemerintah yang ditempatkan di seluruh Kementerian dan Lembaga		100	100	100					
					Jumlah Pelayanan Informasi Publik Melalui Kemitraan dengan SKPD/OPD		30	30	30					
					Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik yang dibina		500	500	500					
					Jumlah Kerjasama Kemitraan dengan Ormas, Lembaga Profesi, dan Lembaga Media untuk Literasi Masyarakat		12	12	12					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	09	3048	Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional							7,959.60	12,465.40	12,901.69	13,353.25	46,679.9
				Konten pencitraan positif indonesia di dunia internasional										
					Jumlah produksi dan publikasi konten pencitraan positif tentang Indonesia berbahasa asing		24	24	24					
				Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga Internasional serta mitra strategis										
					Jumlah kemitraan dengan perwakilan negara asing, lembaga internasional serta media asing dalam rangka pencitraan positif Indonesia		10	10	10					
					Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing yang menerima informasi tentang kebijakan internasional pemerintah		1000	1000	1000					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	09	3049	Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Pers							7,665.40	7,811.70	8,073.39	8,343.88	31,894.4
				Layanan pemanfaatan informasi media cetak dan koleksi benda bersejarah bagi masyarakat										
					Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional		16000	16000	16000					
					Jumlah pengumpulan basis data media cetak sejak pra kemerdekaan sampai dengan saat ini		3	3	3					
					Jumlah laporan survey, kajian, dan workshop koleksi Monumen Pers Nasional		3	3	3					
					Jumlah layanan pendataan, pemeliharaan dan penataan koleksi		12	12	12					
					Jumlah pengadaan sarana dan prasarana peragaan Museum		19	19	19					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah Pameran, dialog budaya, dan roadshow ke sekolah dalam rangka promosi dan publikasi tentang Monumen Pers		29	29	29					
				Layanan Perkantoran										
					Jumlah Layanan Perkantoran		12	12	12					
				Layanan Internal										
					Jumlah Layanan Internal		12	12	12					
059	09	3050	Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi							7,395.87	7,541.30	7,794.89	8,057.04	30,789.1
				Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi										
					Jumlah Pengunjung Museum Penerangan		18000	18000	18000					
					Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Penerangan		40	40	40					
					Jumlah Koleksi Baru yang Dapat Ditampilkan		6	6	6					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan Perkantoran										
					Jumlah Layanan Perkantoran		12	12	12					
				Layanan Internal (overhead)										
					Jumlah Layanan Internal		8	8	8					
059	09	3051	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik							71,970.56	66,391.16	68,564.21	70,808.65	277,734.6
				Layanan Dukungan Manajemen Eselon I										
					Jumlah Layanan Internal Ditjen IKP		12	12	12					
				Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi										
					Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi		1	1	1					
				Layanan Internal										
					Jumlah Layanan Internal		150	150	150					
				Layanan Perkantoran										
					Jumlah Layanan Perkantoran		12	12	12					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	04		Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika							190,134.89	261,466.71	270,321.13	279,476.28	1,001,399.0
				Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian										
				Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian		6 rekomendasi	7 rekomendasi	8 rekomendasi						
				Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah		8 kajian	9 kajian	10 kajian						
				Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika										
				Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah		1220 orang	1220 orang	1220 orang						
				Jumlah Angkatan kerja tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK				100.000 Orang						
				Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri		268 orang	268 orang	268 orang						

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah mahasiswa STMM		2179 orang	2179 orang	2179 orang					
					Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo		4 rancangan	5 rancangan	6 rancangan					
				Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional										
					Jumlah peserta Literasi TIK untuk anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar				1.000.000					
					Jumlah peserta literasi TIK untuk masyarakat umum				500000					
059	04	3035	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI							20,127.38	35,450.00	36,653.77	37,898.53	130,129.7
				Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo										
					Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo		3400 orang	3400 orang	3400 orang					
				Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah peserta pelatihan literasi TIK		700 orang	700 orang	700 orang					
				Jurnal ilmiah yang terakreditasi										
					Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi		2 jurnal	3 jurnal	4 jurnal					
					Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)		2 e-jurnal	3 e-jurnal	4 e-jurnal					
				Pranata litbang yang terakreditasi										
					Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi		2 pranata litbang	3 pranata litbang	4 pranata litbang					
				Layanan Internal (Overhead)										
				Layanan Penelitian dan Pengembangan										
					Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan		1 kajian/penelitian	2 kajian/penelitian	3 kajian/penelitian					
					Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah		1 kajian	2 kajian	3 kajian					
				Layanan Perkantoran										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	04	3036	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi BPPKI							35,248.74	30,997.71	32,003.51	33,042.07	131,292.0
				Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat										
					Jumlah orang yang memanfaatkan galeri internet untuk mengenal TIK		1200 orang	1201 orang	1202 orang					
				Jurnal ilmiah yang terakreditasi										
					Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi		6 jurnal	7 jurnal	8 jurnal					
					Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/ e-journal)		6 e-jurnal	7 e-jurnal	8 e-jurnal					
				Pranata litbang yang terakreditasi										
					Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi		6 pranata litbang	7 pranata litbang	8 pranata litbang					
				Layanan Internal (Overhead)										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan Penelitian dan Pengembangan										
					Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan		12 kajian/penelitian	13 kajian/penelitian	14 kajian/penelitian					
					Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah		6 kajian	7 kajian	8 kajian					
				Layanan Perkantoran										
059	04	3037	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta							46,365.02	51,614.79	53,338.60	55,120.17	206,438.6
				Layanan Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan Teknis										
					Jumlah Mahasiswa		2179 mahasiswa	2180 mahasiswa	2181 mahasiswa					
					Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat		12 kegiatan	13 kegiatan	14 kegiatan					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan Penyelenggaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan STMM										
					Jumlah Laporan Penelitian		30 penelitian	31 penelitian	32 penelitian					
					Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi		21 laporan	22 laporan	23 laporan					
				Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo										
					Jumlah lulusan yang bersertifikasi SKKNI bidang Kominfo		400 orang	401 orang	402 orang					
				Layanan Internal (Overhead)										
				Layanan Perkantoran										
059	04	3038	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik							4,045.51	5,696.95	5,896.34	6,102.72	21,741.5
				Jurnal ilmiah bidang APTIKA IKP yang terakreditasi										
					Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi		1 jurnal	2 jurnal	3 jurnal					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)		1 e-jurnal	2 e-jurnal	3 e-jurnal					
				Pranata litbang yang terakreditasi										
					Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi		1 pranata litbang	2 pranata litbang	3 pranata litbang					
				Layanan Penelitian dan Pengembangan										
					Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan		5 kajian/penelitian	6 kajian/penelitian	7 kajian/penelitian					
059	04	5282	Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Bidang Komunikasi							15,642.00	25,584.46	26,479.91	27,406.71	95,113.1
				Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang komunikasi bagi aparatur										
					Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi bidang komunikasi bagi aparatur pemerintah		500 orang	500 orang	500 orang					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi										
					Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi		2000 orang	2000 orang	2000 orang					
				Layanan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Komunikasi										
					Jumlah LSP bidang komunikasi		3 LSP	4 LSP	5 LSP					
				Layanan Pemberian Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri bidang komunikasi										
					Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi		124 orang	125 orang	126 orang					
				Layanan Penyusunan Rancangan Regulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi										
					Jumlah regulasi SKKNI Bidang Komunikasi		1 RKKNI dan 1 RSKKNI	2 RKKNI dan 1 RSKKNI	3 RKKNI dan 1 RSKKNI					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	04	5283	Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Bidang Informatika							14,169.20	34,332.34	35,533.97	36,777.66	120,813.2
				Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang informatika bagi aparatur										
					Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi bidang informatika bagi aparatur pemerintah		500 orang	500 orang	500 orang					
				Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang informatika										
					Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang informatika		3000 orang	3000 orang	3000 orang					
				Layanan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang informatika										
					Jumlah LSP bidang informatika		3 LSP	4 LSP	5 LSP					
				Layanan Pemberian Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri bidang informatika										
					Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang informatika		124 orang	125 orang	126 orang					
				Layanan Penyusunan Rancangan Regulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Informatika										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah regulasi SKKNI Bidang Informatika		1 RKKNI dan 1 RSKKNI	2 RKKNI dan 1 RSKKNI	3 RKKNI dan 1 RSKKNI					
				Layanan Pengenalan TIK bagi masyarakat										
					Jumlah peserta pelatihan literasi TIK		250 orang	251 orang	252 orang					
059	04	5284	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika							8,140.80	5,723.38	5,923.69	6,131.02	25,918.9
				Jurnal ilmiah bidang SDPPP yang terakreditasi										
					Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi		2 jurnal	3 jurnal	4 jurnal					
					Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)		2 e-jurnal	3 e-jurnal	4 e-jurnal					
				Pranata litbang yang terakreditasi										
					Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi		1 pranata litbang	2 pranata litbang	3 pranata litbang					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan Penelitian dan Pengembangan										
					Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan		6	7	8					
059	04	3042	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Litbang SDM							36,433.19	52,594.57	54,345.13	56,154.16	199,527.1
				Layanan pemberian beasiswa S2/S3 luar negeri bidang kominfo										
					Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang kominfo luar negeri		20 orang	21 orang	22 orang					
				Layanan Dukungan Manajemen Eselon I										
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama		7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen					
					Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen					
					Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtangaan, Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen					
					Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen					
				Layanan Internal (Overhead)										
				Layanan Perkantoran										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	04	3043	Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi							9,963.05	19,472.51	20,146.21	20,843.24	70,425.0
				Layanan pelatihan dan/ sertifikasi bidang kominfo bagi aparatur										
					Jumlah peserta bimbingan teknis dan sertifikasi bidang kominfo bagi aparatur pemerintah		220 orang	220 orang	220 orang					
				Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo										
					Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo		3200 orang	3200 orang	3200 orang					
				Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat										
					Jumlah peserta pelatihan literasi TIK		3250 orang	3250 orang	3250 orang					
				Layanan Internal (Overhead)										
				Layanan Perkantoran										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	01		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika							300,657.51	310,215.51	320,804.78	331,756.34	1,263,434.1
				Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika										
				Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika		80	80	80						
				Persentase (%) pencapaian Index Peningkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional		100%	100%	100%						
059	01	3011	Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika							5,112.13	4,513.00	4,670.96	4,834.44	19,130.5
				Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kominfo										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah Peraturan Menteri yang disederhanakan		50	50	50					
					Jumlah Rekomendasi		3	3	3					
					Jumlah RPM baru yang disusun		20	20	20					
				Layanan Hukum										
					Kasus hukum di lingkungan Kementerian Kominfo yang ditangani		100%	100%	100%					
059	01	3012	Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika							10,505.66	10,820.83	11,199.56	11,591.55	44,117.6
				Layanan Manajemen SDM			12	12	12					
					Indeks Kepuasan Pegawai Kemkominfo terhadap Layanan Kepegawaian		4	4	4					
				Layanan Manajemen Organisasi			12	12	12					
					Indeks kesehatan budaya organisasi		2500%	2500%	2500%					
				Layanan Reformasi Birokrasi			12	12	12					
					Skor Reformasi Birokrasi		80	80	80					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	01	3013	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika							59,981.73	59,848.27	61,733.28	63,677.77	245,241.1
				Layanan Manajemen Keuangan			13	13	13					
					Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		13	13	13					
				Layanan Manajemen BMN			4	4	4					
					Jumlah Laporan Barang Milik Negara Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan SIMAK BMN		4	4	4					
				Layanan Perkantoran			12	12	12					
					Pembayaran Gaji dan Tunjangan		12	12	12					
059	01	3014	Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika							11,043.95	25,626.55	26,523.48	27,451.80	90,645.8
				Layanan Perencanaan			1 Dokumen Perencanaan	2 Dokumen Perencanaan	3 Dokumen Perencanaan					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) rencana program dan anggaran yang mendukung fokus pembangunan pemerintah		80%	180%	280%					
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi			3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen					
					Persentase (%) program kerja prioritas yang direalisasikan sesuai rencana		80%	80%	80%					
059	01	3015	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika							65,291.68	66,750.00	69,086.25	71,504.27	272,632.2
				Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo (ULP)			1	1	1					
					Persentase pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu		100%	100%	100%					
				Layanan Internal (Overhead)			304	304	304					
					Jumlah perangkat pengolah data dan fasilitas perkantoran		305	305	305					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
				Layanan Umum			1	1	1					
					Index kepuasan pegawai terhadap pelayanan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Persuratan dan Kearsipan Kemkominfo		100%	100%	100%					
				Layanan Perkantoran			12	12	12					
059	01	3016	Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika							9,347.43	7,055.50	7,302.44	7,558.03	31,263.4
				Layanan Data dan Informasi			12 bulan layanan	13 bulan layanan	14 bulan layanan					
					Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web		88%	88%	88%					
					Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi Kemkominfo		90%	90%	90%					
					Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian		98%	98%	98%					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	01	3017	Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika							10,712.13	7,140.79	7,390.72	7,649.39	32,893.0
				Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi			12 Bulan	13 Bulan	14 Bulan					
					Persentase (%) pengaduan dan aspirasi masyarakat yang sedang ditindaklanjuti		80%	180%	280%					
					Jumlah publikasi konten Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Publik		50	50	50					
					Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan melalui media		196	196	196					
					Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo		96	96	96					
					Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan Kementerian Kominfo		12	12	12					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama media		12	12	12					
059	01	3018	Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika							4,500.00	6,345.00	6,567.08	6,796.92	24,209.0
				Layanan Kerjasama Internasional			20 Sidang Kerjasama	21 Sidang Kerjasama	22 Sidang Kerjasama					
					Jumlah kerjasama internasional bidang Komunikasi dan Informatika yang dipertahankan dan yang baru terjalin		20	20	20					
					Persentase (%) tersusunnya referensi untuk memperjuangkan tenaga kerja profesional Indonesia di bidang TIK di MEA		100%	100%	100%					
059	01	3019	Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika							33,014.50	16,211.48	16,778.88	17,366.14	83,371.0
				Layanan Pendidikan dan Pelatihan										

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah Peserta Diklat Teknis Manajemen Perubahan		200	200	200					
					Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis		340	340	340					
059	01	3020	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat							21,698.50	18,394.57	19,023.89	19,674.79	78,791.7
				Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat		16 laporan	17 laporan	18 laporan						
					Persentase (%) Layanan Administrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KI Pusat		16	17	18					
				Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi		65%	165%	265%						
					Persentase (%) Penyelesaian sengketa informasi publik		65% kasus/sengketa diselesaikan	65% kasus/sengketa diselesaikan	65% kasus/sengketa diselesaikan					
				Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah		70%	70%	70%						

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) Badan Publik Pemerintah yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik		70%	70%	70%					
				Layanan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat dan Badan Publik			1000 orang dan 400 Badan Publik	1001 orang dan 400 Badan Publik	1002 orang dan 400 Badan Publik					
					Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi tentang Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik		1000 orang	1001 orang	1002 orang					
					Jumlah Badan Publik yang Menerima Informasi tentang Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik		400 Badan Publik	401 Badan Publik	402 Badan Publik					
				Layanan Internal Overhead			31 Unit	32 Unit	33 Unit					
					Persentase (%) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		24	24	24					
					Persentase (%) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		7	7	7					
				Layanan Perkantoran			12 Bulan Layanan	13 Bulan Layanan	14 Bulan Layanan					
					Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran		100	101	102					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	01	3021	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat							48,182.40	52,078.59	53,872.38	55,728.04	209,861.4
				Layanan Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Lembaga Penyiaran										
					Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia		1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan					
					Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran		95%	195%	295%					
					Pemantauan langsung program/isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)		39 Lembaga Penyiaran	40 Lembaga Penyiaran	41 Lembaga Penyiaran					
					Pelaksanaan Pemingkatan (rating) kualitas program/isi siaran televisi		5 Publikasi di Media	6 Publikasi di Media	7 Publikasi di Media					
					Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran		90%	190%	290%					
					Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran		8 Kebijakan	9 Kebijakan	10 Kebijakan					
					Layanan Internal (Overhead)									
					Layanan Perkantoran									

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	01	3022	Dukungan Manajemen Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers							21,267.40	35,430.93	36,655.86	37,923.20	131,277.4
				Layanan Kesekretariatan Dewan Pers			12 bulan	13 bulan	14 bulan					
					Persentase (%) layanan dukungan administrasi non operasional lainnya		100%	200%	300%					
				Layanan Administrasi Bidang Pers			13 dokumen	14 dokumen	15 dokumen					
					Jumlah program kegiatan peningkatan peran Dewan Pers		10 Kegiatan	11 Kegiatan	12 Kegiatan					
					Persentase fasilitasi pengaduan bidang pers yang terselesaikan		90%	190%	290%					
					Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers		Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers	Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers	Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers					
					Terselenggaranya kegiatan World Press Freedom Day		1 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan					
				Layanan Internal (Overhead)			1 layanan	2 layanan	3 layanan					
					Persentase terselenggaranya Layanan Internal		100%	200%	300%					
				Layanan Perkantoran			12 bulan	13 bulan	14 bulan					
					Persentase (%) terselenggaranya Layanan Perkantoran		100%	100%	100%					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika							100.00	500.00	517.50	535.61	1,653.1
059	02	3023	Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika							100.00	500.00	517.50	535.61	1,653.1
				Layanan Internal (Overhead)										
					Luas Gedung dan Ruang Kerja yang direnovasi		100	100	100					
059	03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika							22,606.10	26,109.00	26,968.79	27,857.00	103,540.9
				Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo			26.109,0	26.109,1	26.109,2					
					Persentase Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo		1	2	3					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
					Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal		2000%	2100%	2200%					
					Opini atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP					
					Penilaian Laporan Kinerja Kemkominfo		B	B	B					
					Skor tingkat kapabilitas APIP		3	3	3					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	03	3024	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)							1,156.16	665.85	689.15	713.28	3,224.4
				Layanan Audit Internal		4	4	4						
					Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI		80%	80%	80%					
					Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen SDPPI		20%	20%	20%					
059	03	3025	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Inspektorat Jenderal (PPI dan Itjen)							1,424.42	828.73	857.74	887.76	3,998.7
				Layanan Audit Internal		5	6	7						
					Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen PPI		80%	80%	80%					
					Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen PPI dan Itjen		20%	20%	20%					

KL	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	TOTAL ALOKASI 2015- 2019
	PROG	KEG												
059	03	3026	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Litbang SDM (IKP dan Balitbang SDM)							811.62	603.11	624.22	646.07	2,685.0
				Layanan Audit Internal			5	6	7					
					Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen IKP		80%	80%	80%					
					Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen IKP dan Balitbang SDM		20%	20%	20%					
059	03	3027	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal (Aptika dan Setjen).							939.67	890.23	921.39	953.64	3,704.9
				Layanan Audit Internal			6	7	8					
					Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen Aptika		80%	80%	80%					
					Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen Aptika dan Setjen		20%	20%	20%					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR									TOTAL ALOKASI 2015- 2019
KL	PROG	KEG				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
059	03	3028	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal							18,274.23	23,121.08	23,876.29	24,656.25	89,927.9
				Layanan Audit Internal			6	7	8					
					Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengawasan yang telah direncanakan		90%	90%	90%					
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti		85%	85%	85%					
					Persentase terpenuhinya kriteria IA-CM Level 3		100%	100%	100%					

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015- 2019	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	03	3028		Kerangka Kerja Manajemen Resiko Kementerian Kominfo											12.8		
059	03	3028			Persentase (%) tersusunnya kerangka kerja Manajemen Resiko di lingkungan Kementerian Kominfo			100%	Implementasi 50%	Implementasi 100%							

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA



RUDIANTARA